KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM
Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.fh.ubb.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
Nomor : 2220/UN50/J/SP/2024

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) JANGKA MENENGAH
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024-2029

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan tata organisasi dilingkup Fakultas Hukum dan untuk kelancaran kegiatan di Fakultas Hukum, per1u ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung 2024-2029;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024 - 2028;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 1221/UN50/KP/IX/2024 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Beiitung Periode Tahun 2024- 2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) JANGKA MENENGAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 2024-2029.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024
DEKAN,



JEANNE DARC NOVIAYANTI MANIK
NIPPPK. 197311052021212006

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tentang Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung 2024-2029

Nomor : 2220/UN50/J/SP/2024



RENCANA STRATEGIS
(Renstra) Jangka Menengah
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

TAHUN 2024—2029

PERIODE 2024–2029 • TRANSFORMASI • INOVASI • BERKEADILAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……1

BAB I PENDAHULUAN

1. Latarbelakang Masalah……2
2. Maksud dan Tujuan…….2
3. Ruang Lingkup……3
4. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas…….3
5. Sasaran……4
6. Asas dan Nilai…….4

BAB II PROGRAM PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

1. Penguatan Tata Pamong (*Governance*)……..5
2. Penguatan Tata Kelola (*Management*)……6
3. Perluasan Kerja Sama Strategis (*Partnership*)……6
4. Penguatan Sdm Dosen Dan Tenaga Kependidikan…….6
5. Pengembangan Sarana, Prasarana, Dan Keuangan……..7
6. Peningkatan Mutu Kurikulum Dan Pembelajaran……...8
7. Peningkatan Riset Sejalan Dengan Tridarma Perguruaan Tinggi Dalam 5 Tahun Kedepan Di Program Studi S1 Ilmu Hukum……9
8. Penguatan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Dalam Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)…….……..8

BAB III TABEL RENCANA PENGUATAN PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

1. Tabel Rencana Penguatan Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung…….10

BAB IV RENCANA PENGUATAN MEKANISME EVALUASI DAN PENGENDALIAN (SPMI)

1. Monitoring dan Evaluasi Berkala……12
2. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan……13

BAB V PENUTUP…….14

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah Fakultas Hukum Universitas Bangka Tahun 2024-2029 ini disusun sejalan amanat Undang-undang dan Program Rektor Serta amanatkan Kementerian Pendidikatan Tinggi, Sains dan Teknologi. Renstra ini disusun sebagai upaya pencapaian Fakultas Hukum menjadi Fakultas Berbasis Riset internasional Berlandaskan keunggulan moral, mental dan Intelektual untuk membangan Gerbang Peradaban Keadilan hukum berwawasan Lingkungan pada tahun 2035 sesuai dengan Visin dan misi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Renstra 2024–2029 ini dirancang sebagai pijakan utama dalam mewujudkan visi jangka panjang Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung menuju Fakultas Hukum Berbasis Riset Internasional. Seluruh pemikiran dan program kerja yang tertuang di dalamnya berlandaskan pada keunggulan moral, mental, dan intelektual guna membangun *Gerbang Peradaban yang berwawasan Lingkungan* pada tahun 2035 sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Penyusunan dokumen Renstra ini tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada **Tim Penyusun Renstra** serta seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaganya hingga dokumen ini dapat diselesaikan.

Kami menyadari bahwa pencapaian tujuan besar ini membutuhkan komitmen, kerja sama, dan sinergi yang berkelanjutan. Semoga Renstra ini dapat diimplementasikan secara optimal demi kemajuan pendidikan hukum yang berdampak luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Balinijuk, 21 Oktober 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

BAB I

A. Latarbelakang

Perkembangan dan dinamika hukum saat ini dihadapkan tantangan dalam bagaimana hukum seharusnya dijalankan dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dan mengmewujudkan supremasi hukum yang sebenarnya, kepastian kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) mengambil peran aktif sesuai visinya, "***Gerbang Peradaban dalam membangun peradaban***, dengan berkomitmen menyediakan wadah intelektual, kaderisasi, dan ruang kontemplasi untuk melahirkan insan hukum berkemampuan tinggi. Akselerasi FH UBB menuju fakultas yang berkualitas dan beridentitas kuat terus bergerak maju seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat serta sivitas akademika akan pusat pembelajaran hukum yang matang, baik di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun secara nasional. Pengembangan FH UBB berlandaskan pada tiga nilai fundamental: dedikasi, progresivitas, dan jiwa reformis serta mencerminkan kearifa lokal. Fondasi utama dalam menyelenggarakan pendidikan hukum yang berkualitas.

Pengintegrasian ketiga filosofi tersebut sejalan dengan Visi Universitas Bangka Belitung 2035, yaitu *"menjadi universitas riset yang diakui secara internasional yang menghasilkan sumber daya dan karya unggul di bidang pembangunan berkelanjutan berbasis keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa."* Visi ini mendorong FH UBB untuk terus berinovasi dalam merespons tatanan masyarakat yang dinamis.

FH UBB berkomitmen menempatkan ilmu hukum tidak hanya sebagai ilmu praktis (*practical science*), melainkan juga sebagai ilmu murni (*genuine science*) yang tidak hanya mencetak profesional hukum, tetapi juga para pencari kebenaran. Pendekatan ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi persaingan serta dinamika tantangan dan peluang di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) FH UBB dilakukan secara sistematis, terukur, dan terarah dengan merujuk pada *roadmap* program studi, Rencana Induk Pengembangan (RIP) UBB, serta kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung 2024-2029 (lima Tahun) kedepan untuk:

1. Menjamin kesinambungan program kerja menuju pencapaian tujuan Fakultas
2. Menyiapkan suatu kerangka kerja yang sistematis bagi pertumbuhan dan pengembangan Fakultas
3. Menyiapkan strategi bagi pengalokasian sumber daya.
4. Menciptakan sistem menajerial yang sehat dan dinamis bagi pengembangan atmosir pendidikan yang kompetitif

   Sedang tujuan disusun rencana strategis Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan atau tindakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan
2. Sebagai pedoman dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien
3. Sebagai alat untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat
4. Sebagai sarana untuk menjaga kesinambungan pengembangan FH UBB

C. Ruang Lingkup

Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung 2024-2029 didasarkan pada tiga misi Renstra menristekdikti sebagai salah satu institusi Pendidikan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas daya saing bangsa, yaitu :

1. Ketersediaan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, disertai pembelajaran dan penilaian
2. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM),
3. Pengembangan tata kelola Fakultas
4. Pengembangan kualitas dan relevansi alumni
5. Kebijakan sumber pendanaan fakultas sesuai dengan peraturan Rektor

D. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas

VISI: Menjadi Fakultas Berbasis Riset Internasional Berlandaskan Keunggulan Moral, Mental Dan Intelektual Untuk Membangun Gerbang Peradaban Keadilan Hukum Berwawasan Lingkungan Tahun 2035**.**

Misi Fakultas Hukum

1. Mengembangkan Pendidikan hukum yang unggul dan kompetitif;
2. Meningkatkan riset, dan publikasi Internasional dalam pengembangan ilmu hukum
3. Meningkatkan pengabdian dan kerjasama di bidang hukum

Tujuan Fakultas Hukum

1. Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Dosen Dan Tenaga Kependidikan FH UBB Dengan Dedikasi, Progresif, Reformis
2. Membangun Civitas Akademika Fakultas Hukum Yang Berdedikasi Dan Memiliki Semangat Tinggi, Bersikap Melayani, Mengembirakan Dan Berkomitmen Tinggi
3. Membangun Fakultas Hukum Dengan Jiwa Progresif Serta Memiliki Kemampuan Intelektual Hukum Yang Tidak Lepas Dari Keyakinan Dan Ketaqwaan, Serta Tidak Terpisahkan Dari Kualitas Kepribadian Akhlak Hukum
4. Membangun Sistem Yang Mendorong Civitas Akademika Fakultas Hukum Yang Reformis Yaitu Akselerasi Perubahan Kearah Yang Lebih Kooperatif, Kompetitif, Dan Kolaboratif
5. Menghasilkan Lulusan Hukum Yang Berdedikasi, Progresif, Reformis Serta Unggul Dalam Moral, Mental Dan Intelektual

E. Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan diats serta mempertimbangkan isu hukum, dinamika hukum dan kearifan lokal, maka sasaran Fakultas Hukum Adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan unggul, kompetitif dan berkualitas secara moral mental dan intelektual untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional
2. Manghasilkan riset dan publikasi internasional hukum yang unggul serta pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tagline Unggul dalam membangun Peradaban
3. Menghasilkan berbagai kegiatan pengabdian hukum dimasyarakat dan terjalinnya kerjasama serta kemitraan dengan stakeholder didalam maupun luar negeri
4. Terbangunnya tata kelola lembaga yang akuntable, transparan dan mendukung budaya akademik

F. Asas dan Nilai

1. Asas

   Fakultas Hukum Univeristas Bangka Belitung melaksanakan Fungsinya berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai Falsafah bangsa dan ideologi Negara, serta konstitusi
2. Nilai

   Seperangkat nilai-nilai diletkan sebagai pemandu normatif untuk dihayati dan di berlakukan dalam Institusi Universitas Bangka Belitung seperti dedikasi, progresif, reformasi, kreatif, inovatif tangguh dan lainnya sejalan dengan kebutuhan peraturan
3. Identitas FH UBB

   Nama resmi : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
   Pendidirian : 12 April 2006
   Kedudukan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
   Asas : Pancasila Dan Undang-Undang 1945
   Bendera : Merah
   Suasana Lingkungan: Dedikasi, Progresif, Reformis
   Konsep Diri : Menciptakan, meningkatkan, dan memelihara keunggulan kompetitif melalui sinergisitas antar sumber daya manusia mencapai kemantapan lembaga dan penguatanakademik di FH.
   Etos Kerja : Meningkatkan budaya kerja dan budaya akademik yang kondusif dan profesional dengan dasar-dasar akuntabilitas dan transparansi

BAB II

PROGRAM PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Dalam rangka Pengembangan Menengah jangka 5 tahun, program pengembangan UPPS Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan UPA dikategorikan menjadi: **(**i) Penguatan Unit untuk mewujudkan pendidikan hukum yang unggul dan kompetitif, (ii) Pengembangan riset dan publikasi internasional ilmu hukum, serta Pengembangan Institusi untuk mengoptimalkan pengabdian dan kerja sama hukum yang sejalan dengan sasaran strategis Universitas Bangka Belitung. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) terus berkomitmen mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang sehat, transparan, dan akuntabel guna mendukung terwujudnya visi sebagai pusat pendidikan hukum unggul berbasis riset dan kearifan lokal. Upaya pengembangan dilaksanakan secara sistematis melalui penguatan tiga pilar institusiona

1. PENGUATAN TATA PAMONG (*GOVERNANCE*)

Sistem tata pamong di lingkungan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Bangka Belitung dibangun berdasarkan prinsip-prinsip *Good Faculty Governance* yang mencakup kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Langkah di lakukan untuk dengan model keterbukaan informasi Publik dan keterbukaan Pertanggungjawaban Publik seperti Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan melalui penguatan sistem informasi terintegrasi dan audit berkala. Dalam hal transparansi, FH UBB menerapkan model keterbukaan informasi akademik, anggaran, serta kemahasiswaan yang dapat diakses oleh pihak internal maupun publik secara rinci. Sementara pada aspek akuntabilitas, pengawasan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara periodik melalui pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi penjaminan mutu internal (SPMI), dan audit keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara tepat dan terukur.

Aspek tanggung jawab (*responsibility*) dan keadilan (*fairness*) diterjemahkan ke dalam model tata kelola berbasis kepatuhan hukum dan perlindungan hak civitas akademika. Prinsip tanggung jawab diwujudkan lewat kepatuhan penuh terhadap Peraturan Menteri, pedoman universitas, serta peran aktif fakultas dalam pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola lingkungan kampus. Di saat yang sama, prinsip keadilan diterapkan melalui pemberian kesempatan, reward, serta penanganan keluhan secara adil dan nonskriminatif bagi seluruh dosen, staf, dan mahasiswa.

Selain dari itu juga Memperkuat Tata Kelola Integritas: Mengawal Prodi S1 Ilmu Hukum sebagai Wadah Gerbang Peradaban yang Unggul dengan tujuan Keberadaan Tim Penanganan Benturan Kepentingan merupakan pilar fondasi dalam skema Zona Integritas. untuk mentransformasi Program Studi S1 Ilmu Hukum dari sekadar patuh secara administratif menjadi wadah gerbang peradaban yang unggul, peran tim ini perlu diperkuat secara substantif. Peradaban hukum yang adil dan bermartabat hanya dapat lahir dari institusi pendidikan yang menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan keadilan dalam setiap sendi tata kelolanya.

2. PENGUATAN TATA KELOLA (*MANAGEMENT*)

Penguatan Landasan Operasional dan Digitalisasi Penguatan tata kelola (*management*) diawali dengan pembaruan landasan operasional melalui penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan kode etik yang relevan dengan standar nasional. Langkah ini diimbangi dengan transformasi menuju *digital governance*, di mana seluruh layanan administrasi, manajemen keuangan, hingga evaluasi pembelajaran diintegrasikan dalam sistem informasi berbasis digital. Modernisasi ini bertujuan untuk memangkas birokrasi yang tidak efisien, meminimalisasi potensi celah pelanggaran, serta menjamin keterbukaan informasi bagi seluruh civitas akademika. Penguatan ini setidaknya mampu menjawab kebutuhan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. PERLUASAN KERJA SAMA STRATEGIS (*PARTNERSHIP*)

Dalam rangka Meningkatkan daya saing lulusan dan dampak kemasyarakatan, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam 5 Tahun kedepan memperkuat kerja sama dan atau menjalin kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan baik sekala Daerah, Nasional maupun Internasional

1) Kemitraan Tingkat Nasional & Regional: Memperkuat jejaring melalui Badan Kerja Sama (BKS) Dekan FH PTN Wilayah Barat, lembaga peradilan, instansi pemerintah daerah, dan penegak hukum guna menunjang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), magang mahasiswa, serta penelitian kolaboratif.
2) Sertifikasi & Pelatihan Profesional**:** Bekerja sama dengan lembaga pelatihan terakreditasi untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi hukum bagi dosen dan mahasiswa.
3) Pengabdian dan atau Aadvokasi Masyarakat: Menggandeng pemerintah daerah, desa binaan, dan komunitas lokal dalam kegiatan penyuluhan hukum, pendampingan masyarakat adat, serta penyelesaian isu hukum lingkungan/agraria di Kepulauan Bangka Belitung.
4) Dan atau kegiatan yang sejalan dengan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

4. PENGUATAN SDM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1) Penguatan Dosen

   Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional dari Percepatan studi lanjut ke jenjang Doktor (S-3) bagi dosen yang masih berkualifikasi Magister (S-2) disegerakan untuk studi lanjut selain dari itu didorong percepatan bagi Peningkatan kenaikan jabatan fungsional dosen (Asisten Ahli ke Lektor dan lektor ke lektor Kepal dan dari lektor Menjadi Guru besar. Selain dari itu juga mendoron dosen dalam waktu 5 tahun kedepan harus memperkuat reset, Pengabdian yang sejalan dengan misi dan Visi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Sertifikasi Dosen, Peningkatan Kapasitas Pengajaran yang menjawab tuntutan perkembangan Teknologi dan sebagainya
2) Tenaga Kependidikan

   Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan melalui penguatan kompetensi teknis di bidang administrasi perguruan tinggi, tata kelola kearsipan berbasis digital, serta penyusunan pelaporan yang terintegrasi dengan basis data terpadu institusi. Upaya ini disempurnakan dengan penyelenggaraan pelatihan *service excellence* secara berkelanjutan bagi staf administrasi di unit akademik, kemahasiswaan, dan keuangan. Penggabungan antara keahlian teknologis dan pendekatan pelayanan berorientasi

pengguna ini dirancang untuk menciptakan tata kelola administrasi yang responsif, efisien, dan profesional. Dalam pelaksanaan sehari- harinya Optimalisasi Penguasaan Teknologi dan Sistem Informasi guna mendukung keunggulan operasional tata kelola kampus modern. Pelatihan intensif diarahkan pada pemanfaatan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), perangkat sistem penjaminan mutu internal, serta berbagai aplikasi pendukung keputusan lainnya. Melalui peningkatan literasi digital ini, staf administratif mampu mengoperasikan sistem data secara presisi, mempercepat alur kerja kelembagaan, dan menjamin akurasi serta transparansi data dalam skema penjaminan mutu fakultas. Serta Pengembangan Karir Berkelanjutan melalui penguatan Sertifikasi Profesi Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia jangka panjang, institusi memfasilitasi keikutsertaan staf laboratorium, pustakawan, dan tenaga administratif dalam program sertifikasi serta pelatihan profesi bereputasi. Fokus sertifikasi mencakup bidang kearsipan modern, tata kelola laboratorium hukum, hingga pengelolaan perpustakaan berbasis digital. Langkah strategis ini tidak hanya memperjelas peta jalan jenjang karir staf, tetapi juga memastikan bahwa setiap unit penunjang akademik dikelola oleh personil yang tersertifikasi dan kompeten sesuai standar mutu nasional.

5. PENGEMBANGAN SARANA, PRASARANA, DAN KEUANGAN

penguatan Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Keuangan untuk jangka waktu lima tahun yang dibagi menjadi tiga paragraf berlaras akademik:

1. **Modernisasi Sarana-Prasarana Akademik Berbasis Digital dan Inklusif**
   Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, penguatan sarana dan prasarana diprioritaskan pada modernisasi fasilitas ruang kelas transformatif (seperti *smart classroom*), laboratorium hukum/peradilan semu berbasis audio-visual modern, serta perpustakaan digital terintegrasi. Pengembangan fisik ini diimbangi dengan penyediaan sarana penunjang yang ramah disabilitas, inklusif, dan mendukung iklim pembelajaran kolaboratif. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif terhadap perkembangan teknologi pembelajaran modern serta memenuhi standar akreditasi kelembagaan nasional maupun internasional.
2. **Penguatan Teknologi Informasi Kampus**
   Aspek prasarana diarahkan pada peningkatan kapasitas dan keandalan jaringan internet *(Wi-Fi*), penyediaan server data yang aman, serta pembaruan lisensi perangkat lunak akademik dan riset secara berkelanjutan. Selain itu, penataan ruang publik kampus, fasilitas kegiatan kemahasiswaan, dan ruang kerja dosen dioptimalkan untuk mendorong budaya interaksi ilmiah yang sehat. Pengembangan ruang fisik dan sistem siber yang andal ini akan menjadi penopang utama efisiensi tata kelola operasional serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. **Optimalisasi Manajerial Keua**
   Pada dimensi keuangan, strategi lima tahun berfokus pada efisiensi alokasi anggaran berbasis kinerja (IKU) dan penguatan transparansi akuntansi institusi. Fakultas memformulasikan diversifikasi pendapatan (*income generating units*) melalui perluasan kerja sama riset, pelatihan hukum komersial, layanan konsultasi, dan pengabdian masyarakat bernilai tambah. Penguatan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan akurat ini memastikan keberlanjutan operasional,

ketersediaan dana cadangan investasi, serta ketercapaian sarana-prasarana yang berkualitas secara mandiri.

6. PENINGKATAN MUTU KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) 5 Tahun kedepan berkomitmen melakukan penguatan pendidikan hukum secara menyeluruh guna menjawab tantangan teknologi, globalisasi ekonomi, dan dinamika tata hukum nasional maupun internasional. Transformasi ini diwujudkan melalui tiga pilar utama: Rekonstruksi Kurikulum Berbasis OBE yang Adaptif, Penguatan Metode Pembelajaran Modern (CBL & PjBL), serta Integrasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pada tahap awal, rekonstruksi kurikulum berbasis OBE berfokus pada pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis penguasaan materi (*content-based*) menuju pendekatan berbasis capaian pembelajaran (*outcome-based*). Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diformulasikan secara terukur dengan melibatkan masukan kritis dari para alumni, akademisi, serta praktisi hukum. Langkah ini memastikan setiap lulusan tidak hanya menguasai fondasi teori hukum substantif, tetapi juga memiliki keterampilan bernalar kritis (*critical legal thinking*) dan beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja. Kegiatan ini rangka menjamin relevansi kurikulum terhadap tantangan zaman, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung merestrukturisasi peta mata kuliah dengan memasukkan bidang-bidang hukum modern secara substantif. Penyelenggaraan mata kuliah baru, seperti Hukum Siber (*Cyber Law*), Hukum Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence Law*), serta Hukum Bisnis Global dan Investasi Digital, menjadi prioritas utama. Penyesuaian materi ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam terkait isu perlindungan data pribadi, regulasi etika teknologi, hingga transaksi lintas batas negara.

ketercapaian indikator CPL dalam kurikulum OBE, metode penyampaian materi di dalam kelas ditransformasikan dari perkuliahan searah menjadi pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*). Penerapan *Case-Based Learning* (CBL) mengondisikan mahasiswa untuk membedah dan menganalisis yurisprudensi atau putusan pengadilan riil. Melalui metode ini, ketajaman analisis, pemahaman pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), serta kemampuan memetakan celah hukum mahasiswa dapat diasah secara intensif. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan *Project-Based Learning* (PjBL) diterapkan untuk menguji kemampuan pemecahan masalah hukum (*legal problem-solving*) mahasiswa secara kolaboratif. Mahasiswa diterjunkan dalam proyek simulasi, seperti penyusunan naskah akademik rancangan peraturan, perancangan kontrak bisnis (*legal drafting*), hingga pelaksanaan *legal audit* atau *due diligence* terhadap entitas bisnis. Pendekatan berbasis proyek ini tidak hanya menguji teori, tetapi juga membentuk mentalitas profesionalitas dan kerja tim sejak berada di bangku kuliah.

Sementara itu, integrasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dihadirkan untuk menjembatani teori di ruang kelas dengan realitas dunia kerja dan sosial. FH UBB menyusun mekanisasi rekognisi dan konversi SKS yang transparan sehingga seluruh bentuk aktivitas luar kampus dapat diakui secara sah ke dalam transkrip akademik mahasiswa. Langkah ini membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi kompetensi praktis di luar dinding akademis secara terstruktur. Melalui skema magang industri dan *law firm*, mahasiswa ditempatkan secara langsung pada instansi penegak hukum, firma hukum bereputasi, maupun departemen

legal korporasi. Selama menjalani magang, mahasiswa terlibat aktif dalam penanganan kasus konkret, penyiapan berkas perkara, hingga pemenuhan kepatuhan hukum (*legal compliance*). Pengalaman langsung ini menjadi sarana pembentukan *hard skill* dan *soft skill* yang relevan dengan standar dunia kerja modern. Terakhir, integrasi MBKM diwujudkan melalui program studi/proyek independen dan pengabdian masyarakat terintegrasi seperti KKN Tematik Hukum dan Klinik Hukum. Mahasiswa diajak turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM lokal serta melakukan penyuluhan terkait kejahatan siber dan perlindungan data pribadi. Melalui pengabadian ini, FH UBB memastikan bahwa pengembangan akademik yang adaptif tetap berakar kuat pada nilai kearifan lokal dan kebermanfaatan bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

7. PENINGKATAN RISET SEJALAN DENGAN TRIDARMA PERGURUAAN TINGGI DALAM 5 TAHUN KEDEPAN DI PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

Dalam 5 tahun kedapan Program Studi Fakultas Hukum akan melakukan Penguatan dari Tahu (2025 –2030), antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Tahun 1 dan Tahun 2 akan melakukan Penguatan dan atau mendorong Kloborasi Program Studi Hukum dengan Pihak untuk melakukan riset bersama Sejalan dengan Visi dan Misi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Untuk Tahun 2 melakukan penguatan Riset Kolaboratif Dosen antar dengan Mahasiswa/I. setiap dosen yang melakukan riset Mewajibkan pelibatan mahasiswa dalam riset dosen serta melakukan Penguatan Jurnal Internal di Prodi dalam Meningkatkan akreditasi jurnal hukum milik Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung setindaknya menjadi sinta 2 dan atau sinta 1
3. Tahun ke 3 Tahun Integrasi Riset dengan Pengabdian (*PkM-Based Research*)
4. Serta mendorong wilayah tertentu sebagai laboratorium riset-pengabdian berkelanjutan bagi dosen dan mahasiswa.
5. Untuk Tahun 4 dan 5 Mendorong dan Penguatan Riset Kerjasama baik dalam Satu Payung ilmu Hukum dan juga Interdisipliner dalam Berkolaborasi dengan lembaga pemerintah (Pemda, BPN, APH), NGO, maupun universitas dalam/luar negeri

8. PENGUATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG DALAM MELAKUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Dalam lima tahun ke depan, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung perlu memperkuat pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berbasis pada kebutuhan hukum masyarakat, perkembangan regulasi, serta karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan potensi daerah Kepulauan Bangka Belitung. PkM tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan penyuluhan hukum, tetapi dikembangkan menjadi kegiatan yang mampu memberikan solusi terhadap persoalan hukum masyarakat sekaligus menjadi sarana penerapan hasil penelitian dan pengembangan keilmuan hukum, kegiatan itu dapat dilakukan berupa antara lain:

1. Program Pengbadian Di arahkan dalam pengembangan desa atau komunitas binaan hukum secara berkelanjutan**.** Kegiatan tidak berhenti pada penyuluhan satu kali, tetapi dilaksanakan melalui pendampingan secara periodik. Program Studi dapat mengembangkan konsep seperti Desa Sadar Hukum, Klinik Konsultasi dan Bantuan

Hukum, Desa/Kelurahan Mitra Hukum, serta pendampingan hukum bagi UMKM dan kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki. Setiap wilayah binaan memiliki permasalahan dan indikator capaian yang jelas sehingga keberhasilan Program Pengabdian masyarakat dapat diukur berdasarkan perubahan pengetahuan, kapasitas, tata kelola, atau kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum.

2. Pada tahun berikutnya difokus diarahkan pada perluasan jejaring dan peningkatan dampak Program Pengabdian**.** Program Studi perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta mitra lainnya. Kerja sama tersebut diarahkan tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada penyusunan program bersama, pendanaan, pendampingan, dan keberlanjutan program. Pada tahap ini, hasil Program Pengabdian masyarakat yang memiliki potensi untuk direplikasi dapat dikembangkan menjadi model atau praktik baik yang dapat diterapkan pada wilayah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pada tahun terakhir nanti atau pada tahun kelima di harapkan Program Studi diarahkan pada institusional dan peningkatan keberlanjutan Program Pengabdian Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap pelaksanaan Program Pengabdian masyarakat selama lima tahun, termasuk capaian, luaran, tingkat keterlibatan mitra, keberlanjutan program, serta dampaknya terhadap masyarakat. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan roadmap Program Pengabdian masyarakat periode berikutnya. Pada tahap ini, Program Studi juga perlu meningkatkan publikasi dan dokumentasi hasil PkM dalam jurnal, prosiding, media ilmiah, buku/modul, policy brief, maupun bentuk luaran lain yang relevan. Program Pengabdian masyarakat yang telah terbukti efektif dapat dikembangkan menjadi program unggulan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.

BAB III

TABEL RENCANA PENGUATAN PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Rencana Penguatanya Untuk 5 Tahun Kedepan

No	Indikator	Target Tahun 1	Target Tahun II	Target Tahun III	Target Tahun IV	Target Tahun V
1	Peningkatan Kualifikasi Dosen S 1	30%	40%	60%	65%	75%
2	Publikasi Artikel Scupus	1 artikel	2 Artikel	2 artikel	3 Artikel	artikel
3	Akreditas Program S1 Ilmu Hukum	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik Sekali	Unggul
4	Mendorong Percepatan Funsional Dosen	Lektor (15 %) dari Jumlah Dosen Lektor Kepala (5 % dari Jumlah Dosen	Lektor (15 %) dari Jumlah Dosen Lektor Kepala (5 % dari Jumlah Dosen	Lektor (20 %) dari Jumlah Dosen Lektor Kepala (10 % dari Jumlah Dosen	Lektor (30 %) dari Jumlah Dosen Lektor Kepala (15 % dari Jumlah Dosen	Lektor (50 %) dari Jumlah Dosen Lektor Kepala (15 % dari Jumlah Dosen
5	Mendorong dan Penguatan pengunaan Laboratariu m Program Studi S1 Ilmu Hukum	Mendoron g Pengunaan Lab	Mendoron g Pengunaan Lab	Pembenahan dan modernisasi fasilitas Laboratoriu m Peradilan Semu (*Moot Court*) serta ruang klinik hukum.	Digitalisasi sarana prasarana laboratorium (pengembanga n fasilitas sidang virtual dan Laboratorium Cyber Law)	Pengunaa n Lab secara Maksimal

BAB IV

RENCANA PENGUATAN MEKANISME EVALUASI DAN PENGENDALIAN (SPMI)

1. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dalam lima tahun ke depan perlu memperkuat sistem penjaminan mutu internal melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara terencana, berkala, dan berkelanjutan. AMI dilaksanakan untuk memastikan seluruh proses akademik dan nonakademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Pelaksanaan AMI tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen, tetapi juga diarahkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, risiko, serta peluang perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Program Studi S1 Ilmu Hukum. Pada tahun pertama, Program Studi perlu memfokuskan kegiatan pada penguatan sistem dan kesiapan pelaksanaan AMI. Hal ini dilakukan melalui penataan dokumen mutu, pemutakhiran standar dan indikator kinerja, penyusunan instrumen audit, serta penetapan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas. AMI dapat dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebijakan universitas, disertai dengan monitoring internal secara rutin, sehingga permasalahan yang ditemukan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Hasil AMI menjadi dasar bagi Program Studi dalam menyusun rencana perbaikan dan peningkatan mutu pada periode berikutnya

Untuk tahun kedua, pelaksanaan AMI diarahkan pada peningkatan kualitas proses akademik dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT**)** Program Studi S1 Ilmu Hukum. Setiap indikator perlu ditetapkan target yang terukur, dilengkapi dengan sumber data dan mekanisme pemantauan yang jelas. Evaluasi dilakukan terhadap capaian bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, sumber daya manusia, kerja sama, tata kelola, serta indikator lain yang ditetapkan oleh universitas dan program studi. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian target sekaligus mengidentifikasi indikator yang masih memerlukan peningkatan. Pada tahun ketiga**,** Program Studi perlu mengembangkan sistem evaluasi berbasis data dengan mengintegrasikan hasil AMI, capaian IKU/IKT, evaluasi pembelajaran, kinerja dosen, kepuasan mahasiswa dan pengguna lulusan, serta masukan dari pemangku kepentingan. Data tersebut dianalisis secara berkala untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pengambilan keputusan di tingkat program studi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif, tetapi juga menggunakan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun keempat, fokus diarahkan pada penguatan tindak lanjut hasil AMI dan evaluasi IKU/IKT melalui mekanisme *PPEPP* (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Setiap temuan AMI dan indikator yang belum mencapai target harus memiliki rencana tindak lanjut, penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, serta mekanisme pemantauan. Program Studi perlu memastikan bahwa rekomendasi hasil audit benar-benar dilaksanakan dan tidak berhenti pada penyusunan laporan. Pada tahap

ini, budaya mutu perlu diperkuat melalui keterlibatan aktif pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan

Pada tahun kelima**,** Program Studi S1 Ilmu Hukum diarahkan untuk membangun budaya mutu yang berkelanjutan dan berbasis peningkatan kinerja. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap pelaksanaan AMI dan pencapaian IKU/IKT selama lima tahun untuk mengukur efektivitas program, melihat kecenderungan peningkatan atau penurunan capaian, serta menentukan prioritas pengembangan periode berikutnya. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan rencana strategis dan program kerja selanjutnya. Dengan demikian, AMI dan evaluasi IKU/IKT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi menjadi bagian integral dari siklus peningkatan mutu Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung secara berkelanjutan.

2. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan

Dalam lima tahun ke depan, Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung akan memperkuat mekanisme pengendalian dan peningkatan mutu melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan**)** secara konsisten dan berkelanjutan. Setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra/RPJM akan dipantau dan dievaluasi secara berkala berdasarkan indikator, target, serta bukti capaian yang terukur. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan tingkat ketercapaian program, mengidentifikasi kendala, serta menetapkan langkah perbaikan agar pelaksanaan program studi tetap berada pada arah strategis yang telah ditetapkan. Program Studi juga akan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala sebagai forum untuk membahas hasil evaluasi, temuan Audit Mutu Internal (AMI), capaian IKU/IKT, serta berbagai permasalahan yang memengaruhi pencapaian sasaran strategis.

RTM diarahkan tidak hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi sebagai mekanisme pengambilan keputusan untuk menetapkan tindak lanjut yang jelas, termasuk penentuan prioritas perbaikan, penanggung jawab, batas waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Hasil RTM selanjutnya didokumentasikan dan dipantau pelaksanaannya sehingga setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti dan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja Program Studi S1 Ilmu Hukum. Apabila dalam pelaksanaan Renstra/RPJM terdapat target yang belum tercapai, Program Studi akan menerapkan langkah korektif dan preventif berdasarkan hasil analisis penyebab ketidaktercapaian. Langkah tersebut dapat berupa penyesuaian program kerja, penguatan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, optimalisasi anggaran, penguatan kerja sama, maupun penyempurnaan metode pelaksanaan kegiatan. Dalam lima tahun, hasil pengendalian tersebut akan menjadi dasar peningkatan standar dan penyusunan program kerja pada periode berikutnya, sehingga siklus PPEPP berjalan secara utuh dan mampu membangun budaya mutu serta peningkatan kinerja Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung disusun berdasarkan kondisi umum di lingkungan internal dan lingkungan eksternal serta kebijakan terkait dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini digunakan sebagai Dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Lima Tahun Program Studi S1 Ilmu Hukum Univeristas Bangka Belitung. Rencana 5 Tahun ini akan dijabarkan dalam penjabaran dan penyempurnaan ke dalam rencana program studi S1 Jangka Pendek dan dilengkapi dengan langkah operasional serta indiator kinerjanya untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian Rencana ini. Semua kegiatan dalam program kerja maupun anggaran akan mengacu pada Renstra Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Bangka Belitung. Apabila terjadi perubahan kondisi internal dan perkembangan eksternal yang mengakibatkan perubahan strategis atau tidak terlaksananya Renstra ini, maka akan dilakukan perubahan- perubahan untuk penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya.